



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024



DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA dan
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN WONOGIRI

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
KATA PENGANTAR.....	v

BAB I PENDAHULUAN.....	1
-------------------------------	----------

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi	2
1.3 Permasalahan Utama Yang Dihadapi/ Isu Strategis	9
1.4 Keadaan Pegawai	11
1.5 Keadaan Sarana Dan Prasarana	13
1.5 Sistematika Penulisan	16

BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	18
--	-----------

2.1 Rencana Strategis	18
2.1.1 Visi	20
2.1.2 Misi.....	21
2.1.3 Tujuan dan Sasaran	21
2.2 Rencana Kinerja Tahunan.....	25
2.3 Perjanjian Kinerja	26

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	29
---	-----------

3.1 Capaian Kinerja Organisasi	30
3.2 Realisasi Anggaran	65

BAB IV PENUTUP	71
-----------------------------	-----------

4.1 Kesimpulan	71
4.2 Rekomendasi	73

LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja
RKT / Lain2 yang dianggap perlu

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah ASN dan Non ASN sesuai Golongan Tahun 2024.....	11
Tabel 1.2 Kepegawaian berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2024.....	12
Tabel 1.3 Keadaan Sarana dan Prasarana.....	13
Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja	24
Tabel 2.2 Rencana Kinerja Tahun 2024.....	25
Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024	27
Tabel 3.1.1 Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran.....	32
Tabel 3.1.1.1 Hasil Evaluasi Akuntabilitas Dinas PPKB dan P3A Tahun 2023 ..	34
Tabel 3.1.1.2 Matrik Tindak Lanjut Evaluasi AKIP Tahun 2023	35
Tabel 3.1.1.3 Nilai Indeks Pembangunan Gender Tahun 2024.....	37
Tabel 3.1.1.4 Nilai Kematangan Dinas PPKB dan P3A Tahun 2024.....	38
Tabel 3.1.1.5 Agen Perubahan Dinas PPKB dan P3A Tahun 2024	39
Tabel 3.1.1.6 Nilai Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2024	40
Tabel 3.1.1.7 Pengolahan Data Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2024	42
Tabel 3.1.2 Analisis Realisasi Kinerja dan Pencapaian Kinerja	46
Tabel 3.1.3 Analisis Pencapaian Kinerja dengan Target Akhir RPJMD	52
Tabel 3.1.4 Analisis Pencapaian Kinerja dengan Target Standar Nasional/Provinsi ...	54
Tabel 3.1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja.....	55
Tabel 3.1.6 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan	61
Tabel 3.2.1 Capaian Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	66

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Dinas PPKB dan P3A Tahun 2024.....	8
Gambar 3.1	Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Kinerja Tahun 2024.....	59

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karuniaNya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri Tahun 2024 dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata kepemerintahan yang baik (good governance), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Wonogiri, bahwa Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa output maupun outcome.

Disisi lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri.

Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Tahunan 2024, Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dan Rencana Strategis 2021 – 2026 serta Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 yang telah ditetapkan.

Wonogiri, 30 Januari 2025

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA dan PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN WONOGIRI



KURNIA LISTIYARINI, A.P., M.SI

Pembina Utama Muda
NIP. 19750521 199311 2 001



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (Dinas PPKB dan P3A) Kabupaten Wonogiri selaku unsur pembantu pimpinan, didorong untuk selalu melakukan pemberian kinerja. Pemberian kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Wonogiri, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan



tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kab/Kota, Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan dengan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri Tahun 2024 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

1.2 Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Wonogiri No. 109 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri mempunyai tugas dan kewajiban :



Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan Kepada Daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
2. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
5. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan Dinas,dan;
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Dinas dipimpin oleh Kurnia Listiyarini, A.P., M.Si. yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat struktural dan fungsional sebagaimana terdapat dalam struktur organisasi dibawah ini :

a. Sekretariat

Tugas : melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi bidang perencanaan, pelaporan keuangan, umum dan kepegawaian dilingkungan Dinas.

Fungsi : (a) Pengkoordinasian penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, anggaran, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan di lingkungan Dinas; (b) Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketata usahaan, kepegawaian, keuangan, kerumah tanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip, pengelolaan informasi dan dokumentasi dilingkungan Dinas; (c) Pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tatalaksana Dinas; (d) Pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Dinas; (e) Pengelolaan dan penatausahaan aset serta pelayanan pengadaan barang/jasa dilingkungan Dinas; (f) Pengkoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Dinas; (g) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Adapun Sekretariat terdiri dari 2 Sub Bagian, yaitu:

a.1 Sub Bagian Keuangan

Yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan mengintegrasikan bahan perencanaan dan pelaporan, pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan Sistem



Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), pengelolaan dan penatausahaan keuangan serta pelayanan pengadaan barang/jasa dilingkungan Dinas.

a.2 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan secara terpadu, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang umum dan kepegawaian.

b. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Tugas : melaksanakan perumusan kebijakan teknis, penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana

Fungsi : (a) pelaksanaan perumusan penyusunan kebijakan teknis bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana; (b) pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintah bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana; (c) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana; (d) pelaksanaan administrasi Dinas dalam penyelenggaraan teknis bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana; dan (e) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana , terdiri dari 2 (dua) Jabatan Fungsional yaitu:



b.1 Penata Kependudukan Dan Keluarga Berencana Ahli Muda

Jabatan fungsional tersebut bertanggung jawab terhadap kepala Dinas melalui Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Jabatan fungsional tersebut mempunyai tugas Melakukan kegiatan penatalaksanaan, penyelenggaraan dan pengembangan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga.

c. Bidang Keluarga Sejahtera

Tugas : melaksanakan perumusan kebijakan teknis, penyelenggaran pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah bidang keluarga Sejahtera.

Fungsi : (a) pelaksanaan perumusan penyusunan kebijakan teknis bidang keluarga sejahtera; (b) pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan pemeritah bidang keluarga sejahtera; (c) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang keluarga sejahtera; (d) pelaksanaan administrasi Dinas dalam penyelenggaraan kebijakan teknis keluarga sejahtera; dan (e) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang deberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya,

Bidang Keluarga Sejahtera, terdiri dari 2 Jabatan Fungsional yaitu:

c.1 Penata Kependudukan Dan Keluarga Berencana Ahli Muda;

Jabatan fungsional tersebut bertanggung jawab terhadap kepala Dinas melalui Kepala Bidang Keluarga Sejahtera. Jabatan fungsional tersebut mempunyai tugas Melakukan kegiatan



penatalaksanaan, penyelenggaraan dan pengembangan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga.

d. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tugas : melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan koordinasi, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Fungsi : (a) pelaksanaan perumusan penyusunan kebijakan teknis bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; (b) pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintah bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; (c) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; (d) pelaksanaan administrasi Dinas dalam penyelenggaraan kebijakan teknis bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan (e) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri dari 2 (dua) Kelompok Jabatan Fungsional, yaitu :

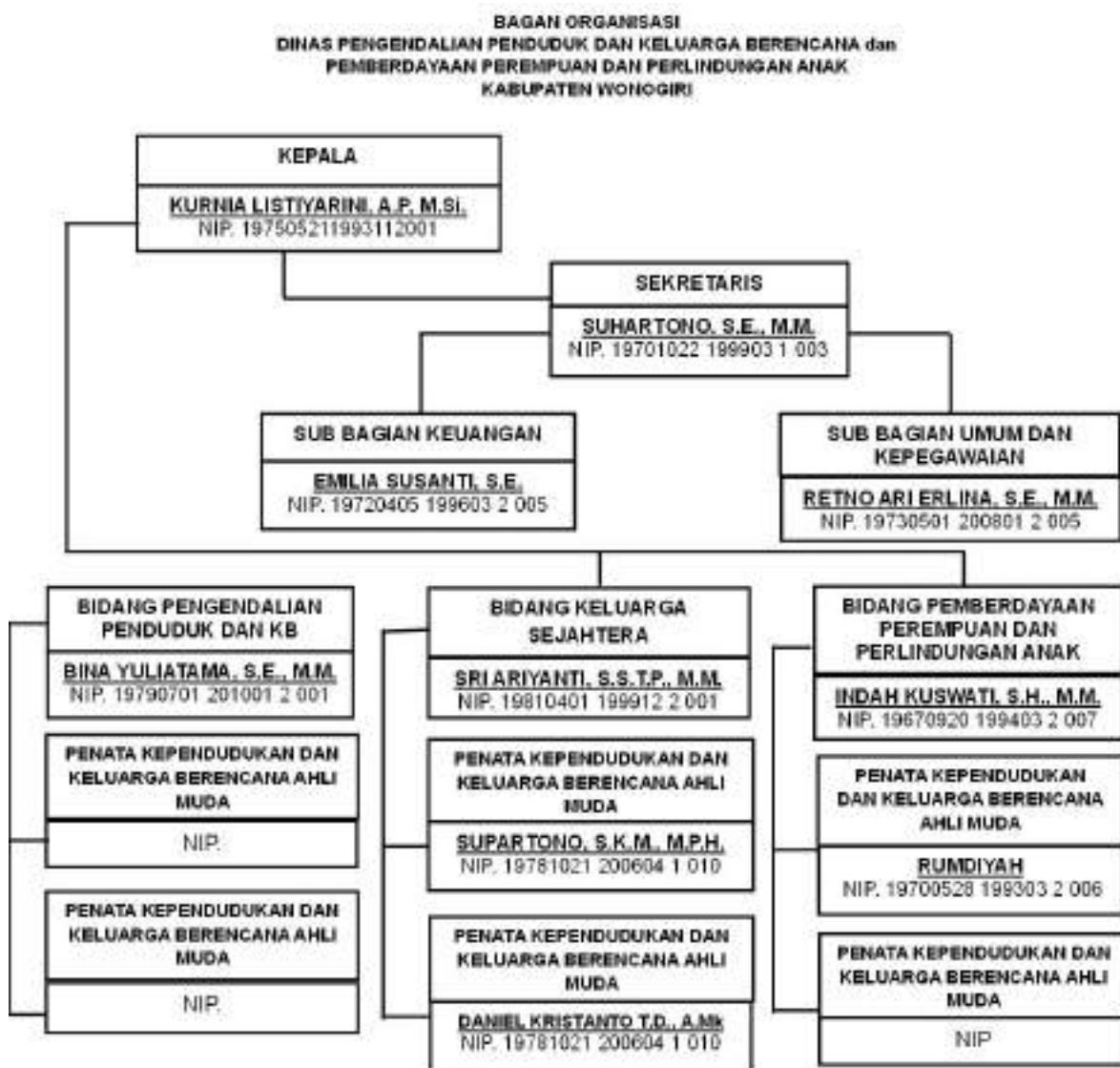
d.1 Penata Kependudukan Dan Keluarga Berencana Ahli Muda;

Jabatan fungsional tersebut bertanggung jawab terhadap kepala Dinas melalui Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Mempunyai tugas melakukan kegiatan penatalaksanaan, penyelenggaraan dan pengembangan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga.



Struktur organisasi Dinas PPKB dan P3A kabupaten Wonogiri terdiri dari Kepala Dinas, Sekretaris dengan 2 Sub Bagian, 3 bidang dengan 6 Jabatan Fungsional. Struktur Organisasi Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 4 Tahun 2024 dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Dinas PPKB dan P3A Tahun 2024





1.3 Permasalahan Utama Yang Dihadapi/ Isu Strategis

A. Isu Strategis

Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Pemerintah Kabupaten Wonogiri, merupakan salah satu Perangkat Daerah (PD) yang mendapatkan tugas berkenaan dengan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, tugas ini sudah barang tentu berkaitan erat dengan agenda strategis dan prioritas dari Pemerintah Kabupaten Wonogiri, terutama terkait erat dengan obyek Pembangunan yaitu Penduduk sebagai modal dasar dan faktor dominan pembangunan harus menjadi titik sentral dalam pembangunan berkelanjutan, maka penting pemerintah untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk serta membentuk keluarga yang berkualitas. Perempuan dan Anak yang merupakan faktor penting dalam penyelesaian masalah pembangunan dan penentu masa depan bangsa dan negara. Hal ini dapat dilihat keterkaitannya dari jumlah penduduk yang besar dengan kualitas rendah dan pertumbuhan yang cepat akan memperlambat tercapainya kondisi yang ideal antar kuantitas dan kualitas penduduk dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta jumlah penduduk perempuan yang lebih banyak dibandingkan penduduk laki-laki, namun belum menjadikan suatu kekuatan dalam pembangunan karena belum terayomi dan terlindunginya hak-hak perempuan dan anak, hal ini dikarenakan masih lemahnya kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak.

B. Permasalahan Utama

Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak :

- a. Belum optimalnya pemenuhan cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan.
- b. Perlindungan Perempuan dan Anak yang belum optimal.



- c. Belum optimalnya tingkat capaian Kabupaten Layak Anak.

Adapun alternatif solusi yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala dimaksud telah diambil langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan Pemahaman korban kekerasan terhadap Perempuan dan Anak untuk berani melapor.
- b. Meningkatkan pengembangan lembaga penyedia pelayanan kualitas keluarga.
- c. Meningkatkan pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Ketahanan Keluarga dan Perlindungan Anak bagi Keluarga.
- d. Meningkatkan Koordinasi dan komunikasi lintas sektor dalam pencapaian Kabupaten Layak Anak yang optimal.
- e. Advokasi kebijakan dan peningkatan pendampingan pemenuhan hak anak pada lintas sektor.

Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Permasalahan yang dihadapi :

- a. Laju Pertumbuhan Penduduk.
- b. Belum optimalnya Rasio Akseptor KB.
- c. Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi.

Adapun alternatif solusi yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala dimaksud telah diambil langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan Komunikasi, Informasi dan Edukasi terhadap program Bangga Kencana;
- b. Meningkatkan Kompetensi tenaga pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Remaja;
- c. Meningkatkan kesertaan KB Pria;
- d. Meningkatkan pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan KB;



- e. Peningkatan pembangunan Keluarga melalui pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;

1.4 Keadaan Pegawai

Aset utama yang dimiliki oleh Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya adalah Sumber Daya Manusia. Jumlah Pegawai Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak pada tahun 2024 sebanyak 15 (lima belas) orang ASN dan 28 (dua puluh delapan) orang Pegawai Non ASN termasuk tenaga lapangan. Jika dilihat dari komposisi golongan, Golongan IV/c sebesar 2,32% atau 1 orang, Golongan IV/b sebesar 2,32% atau 1 orang, Golongan IV/a sebesar 6,97% atau 3 orang, Golongan III/d sebesar 9,30% atau 4 orang, Golongan III/c sebesar 2,32% atau 1 orang, Golongan III/b sebesar 4,65% atau 2 orang, Golongan III/a sebesar 2,32% atau 1 orang, Golongan II/d sebesar 4,65% atau 2 orang, sedangkan untuk Pegawai Non ASN sebesar 65,11% atau 28 orang.

Tabel 1.1
Jumlah ASN dan Non ASN sesuai Golongan Tahun 2024

No	Golongan	Jumlah	Persentase
1.	IV/c	1	2,32
2.	IV/b	1	2,32
3.	IV/a	3	6,97
4.	III/d	4	9,30
5.	III/c	1	2,32
6.	III/b	2	4,65
7.	III/a	1	2,32
8.	II/d	2	4,65
9.	Non ASN	28	65,11
		43	



Sedangkan apabila dilihat dari komposisi pendidikan, 16,27% atau 7 orang berpendidikan S2, kemudian 44,18% atau 19 orang berpendidikan S1, sebanyak 4 orang atau 9,30% berpendidikan D3, lalu 27,90% atau 12 orang berpendidikan SMA dan terakhir 2,32% atau 1 orang berpendidikan SMP.

Tabel 1.2

Kepegawaian berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2024

No	Pendidikan	Jumlah	Percentase
1	S2	7	16,27
2	S1	19	44,18
3	D3	4	9,30
4	SMA	12	27,90
5	SMP	1	2,32
		43	

LKjIP Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wonogiri Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 196);
3. Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Wonogiri Nomor 27 Tahun 2024 tentang Rencan Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2024 Nomor 27);



4. Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Wonogiri Nomor 58 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 58);
5. Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Wonogiri Nomor 65 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021-2026;
6. Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Wonogiri Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri Tahun 2024.

1.5 Keadaan Sarana Dan Prasarana

Sarana dan Prasarana Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri Tahun 2024 sebagai berikut

Tabel 1.3
Keadaan Sarana dan Prasarana

NO	URAIAN BARANG	JUMLAH	SATUAN
1	Portable Generating Set	1	Unit
2	Portable Water Pump	1	Unit
3	Kendaraan Mobil Unit Penerangan	2	Unit
4	Kendaraan Unit Pelayanan	1	Unit
5	Kendaraan Unit Pelayanan Akseptor	2	Unit
6	Kendaraan Unit PPPA	1	Unit
7	Kendaraan Angkutan Barang	1	Unit
8	Kendaraan Operasional	2	Unit
9	Sepeda Motor Roda 2 (Dua) Operasional PKB	80	Unit
10	Sepeda Motor Roda 2 (Dua) Operasional PPA	2	Unit



NO	URAIAN BARANG	JUMLAH	SATUAN
11	Sepeda Motor Roda 2 (Dua) Anti Stunting	2	Unit
12	Troli	1	Unit
13	Mesin Ketik	1	Unit
14	Lemari Besi/Metal	1	Buah
15	Lemari kayu	35	Buah
16	Rak Besi	9	Buah
17	Rak Kayu	42	Buah
18	filling Cabinet	6	Buah
19	Kardek Kayu	1	Buah
20	Lemari Kaca	49	Buah
21	Papan Visual/Papan Nama	37	Buah
22	Papan Instansi	1	Buah
23	Papan Pengumuman	28	Buah
24	White Board	29	Buah
25	Penghancur Kertas	1	Buah
26	LCD Proyektor	12	Unit
27	Meja Kerja Kayu	110	Buah
28	Kursi Besi Metal/Kursi Kerja	73	Unit
29	Sice	5	Set/paket
30	Kursi Panjang Besi/Metal	2	Buah
31	Meja Rapat	100	Buah
32	Tempat tidu kayu	1	Buah
33	Meja Resepsionis	2	Set/paket
34	Meja Bundar	10	Buah
35	Meja 1/2 Biro	45	Buah
36	Kursi Rapat	1.046	Buah
37	Kursi Tamu	1	Set
38	Kursi Putar	8	Buah
39	Lemari pakaian	1	Buah
40	Gorden	7	Set/paket
41	Taplak Meja Prasmanan	1	Set/paket
42	Taplak Meja bundar	11	Buah
43	Backdroop Pertemuan	1	Set/paket
44	Pallet Lantai	10	Buah
45	Vacum Cleaner	1	Buah
46	AC Split	22	Unit
47	Kipas Angin	105	Buah



NO	URAIAN BARANG	JUMLAH	SATUAN
48	Exhause Fan	14	Buah
49	Kompor Gas	2	Buah
50	Alat Dapur	1	Buah
51	Televisi	2	Buah
52	Cassete Recorder	35	Buah
53	Sound System	1	Unit
54	Wireless (TOA)	27	Unit
55	Unit Power Supply (UPS)	2	Unit
56	Camera Video	1	Buah
57	Taplak Meja & Sarung Kursi	1	Set
58	Lambang Garuda Pancasila	2	Buah
59	Tiang Bendera	2	Buah
60	Tangga Aluminium	1	Buah
61	Mimbar/Podium	2	Buah
62	Switching Listrik Genset	1	Buah
63	Tape Mini Compo LG	2	Buah
64	Deep Soup Bowl	2	Buah
65	Alat Pemadam/Portable	1	Set
66	Meja Kerja Pejabat	13	Buah
67	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	8	Buah
68	Meja Tamu Biasa	1	Buah
69	Kursi Kerja Pejabat	20	Buah
70	Lemari Buku Arsip	22	Buah
71	Audio Amplifier	1	Buah
72	Microphone/Wireless MIC	3	Set
73	Camera + Attachmen	1	Buah
74	LCD Proyektor BenQ MW550	25	Unit
75	Microphone Table Stand	1	Buah
76	CCTV	4	Buah
77	Pointer	2	Buah
78	Meja Projector	2	Buah
79	Camera Electronic (SLR)	1	Buah
80	Layar Film	2	Buah
81	Camera Digital	2	Buah
82	Pesawat Telephone	1	Buah
83	Tablet Samsung	53	Unit
84	Faxsimile	1	Unit



NO	URAIAN BARANG	JUMLAH	SATUAN
85	Loudspeaker	4	Buah
86	Tensimeter	4	Buah
87	Clinical Thermometer (Alat Kedokteran Umum)	1	Buah
88	Lemari Obat (Kaca)	25	Buah
89	Service Model Kit (Sterilisator uap)	3	Set
90	Service Model Kit (IUD Kit)	12	Set
91	Service Model Kit (Gynbed)	12	Set
92	Service Model Kit (Implant Kit)	25	Set
93	Service Model Kit (KIE Kit)	9	Set
94	Service Model Kit (Minilap Kit)	1	Set
95	Service Model Kit (APE)	6	Set
96	Service Model Kit (Genre Kit)	6	Set
97	Service Model Kit (KIE Kit)	25	Set
98	Gynecological Examining Table (Obgynbed)	42	Set
99	Minilaparatomy Instrument Set	1	Set

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan LKjIP Dinas PPKB dan P3A Tahun 2024 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini menyajikan gambaran umum yang melatar belakangi dasar penyusunan LKjIP, Tugas dan Fungsi serta struktur organisasi Perangkat Daerah, Aspek Strategis dan Isu Strategis yang dihadapi didalam pelaksanaan pembangunan, dasar hukum dan sistematika penulisan.



BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada Bab ini menyajikan uraian ringkasan/ikhtiar Perjanjian Kinerja tahun yang bersangkutan

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada Bab ini menyajikan :

1. membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu;
3. membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis;
4. membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

BAB IV PENUTUP

Pada Bab ini menyajikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja



BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

2.1 Rencana Strategis

Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri. Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 65 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 – 2026. Renstra Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati menjadi Pedoman kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD. Renstra Perangkat Daerah Kabupaten wonogiri Tahun 2021 – 2026, memuat rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Bupati Wonogiri terkait dengan penetapan/kebijakan bahwa Rencana Strategis



Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri tahun 2021-2026 adalah sebagai penjabaran secara operasional bagi visi dan misi Program Bupati guna menentukan pedoman dan arah perencanaan, evaluasi dan pelaksanaan pembangunan pada Urusan Penunjang Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak .

Penyusunan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri telah melalui tahapan-tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Wonogiri Tahun 2021–2026 dengan melibatkan *stakeholders* pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri dengan *stakeholder*.

Selanjutnya, Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak



Kabupaten Wonogiri dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

2.1.1 Visi

Visi pembangunan Kabupaten Wonogiri tahun 2021–2026 merupakan keberlanjutan dari implementasi visi Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri periode 2021–2026. Capaian selama 5 (lima) tahun berdasarkan urusan pemerintah konkuren, unsur pendukung urusan pemerintahan, urusan penunjang, urusan pemerintahan, unsur pengawasan, urusan pemerintahan, unsur kewilayahan dan urusan pemerintahan umum serta disinkronisasikan dengan capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), menjadi pertimbangan penting dalam penetapan Visi Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 -2026 yaitu :

“ Mewujudkan Wonogiri yang Maju, Mandiri dan Sejahtera “ dengan semangat Go Nyawiji Sesarengan Mbangun Wonogiri.

Visi merupakan pernyataan cita-cita atau impian sebuah kondisi yang ingin dicapai dimasa depan. Kondisi yang dicita-citakan tersebut adalah kondisi yang pada akhir periode dapat diukur capaianya melalui berbagai usaha pembangunan. Usaha-usaha pembangunan yang dilaksanakan, umumnya berorientasi untuk memperbaiki tingkat hidup (*level of living*) masyarakat.

Terhadap Visi jangka menengah Kabupaten Wonogiri tersebut, maka Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri sebagai Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.



2.1.2. Misi

Perwujudan Visi pembangunan ditempuh melalui misi untuk memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan, maka ditetapkan 4 (empat) misi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Wonogiri Tahu 2021 – 2026 sebagai berikut :

- a. Menjadikan rakyat wonogiri yang lebih pintar, lebih sehat dan lebih berbudaya.
- b. Mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi di Pemerintah Kabupaten Wonogiri.
- c. Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran.
- d. Membangun pemenuhan sarana dan prasarana dasar di Wonogiri yang berkualitas dan berwawasan lingkungan guna menunjang pengembangan wilayah.

2.1.3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Intansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan.



Agar Visi dan Misi Pembangunan daerah Kabupaten Wonogiri tahun 2021 – 2026 lebih terarah dalam implementasinya ke depan, maka visi dan misi tersebut dijabarkan secara operasional dalam tujuan dan sasaran disertai dengan indikator kinerjanya. Penjabaran tujuan dan sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Wonogiri tahun 2021 – 2026 meliputi 4 (empat) tujuan dan 11 (sebelas) sasaran, yang diuraikan sebagai berikut:

Empat Tujuan :

1. Meningkatkan kualitas hidup rakyat menjadi lebih pintar, lebih sehat dan lebih berbudaya.
2. Mewujudkan pemerintahan yang Baik dan Bersih.
3. Meningkatkan perekonomian masyarakat.
4. Mewujudkan pemerataan aksebilitas dan pengembangan wilayah.

Sebelas Sasaran :

1. Meningkatnya kualitas pendidikan dan aksebilitas pendidikan.
2. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat.
3. Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak.
4. Terwujudnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel.
5. Terwujudnya birokrasi yang kapabel.
6. Terwujudnya pelayanan publik yang prima.
7. Meningkatnya pertumbuhan investasi, Menurunnya kemiskinan, Menurunnya pengangguran.



8. Meningkatnya akses wilayah yang berkualitas.
9. Meningkatnya akses air baku.
10. Terwujudnya keseimbangan lingkungan hidup.
11. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat.

Berkaitan dengan Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Wonogiri tersebut, maka Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak sebagai salah satu Perangkat Daerah dilingkup Pemerintah Kabupaten Wonogiri dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya untuk merumuskan, melaksanakan, memantau, memonitor dan pelaporan kebijakan dalam pengelolaan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang memiliki peran penting mendukung pencapaian Visi dan seluruh Misi Pembangunan Kabupaten Wonogiri selama 5 (lima) tahun ke depan.

Keterkaitan Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri dengan Misi Pemerintah Kabupaten Wonogiri terutama pada Misi 1 yaitu Menjadikan Rakyat Wonogiri yang lebih pintar, lebih sehat dan lebih berbudaya. Mendukung Tujuan 1 : yaitu Meningkatkan Kualitas Hidup rakyat menjadi lebih pintar, lebih sehat dan lebih berbudaya. Serta mendukung sasaran ke 3 : Yaitu Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Anak, sebagaimana telah ditetapkan tujuan, sasaran, Indikator kinerja dan target sebagai berikut :



Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja

NO	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN					
						2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
1	Mewujudkan Perlindungan Perempuan dan Anak	-	-	Rasio Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak serta Terwujudnya Kabupaten Layak Anak	Persen	100	100	100	100	100	100
		1.1	Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Penanganan Pengaduan	Persen	100	100	100	100	100	100
				Tingkat Capaian Kabupaten Layak Anak	Tingkatan	Pratama	Madya	Madya	Nindya	Nindya	Utama
2	Mewujudkan Pengendalian Penduduk	-	-	Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk	Persen	0,27	0,265	0,260	0,255	0,250	0,245
		2.1	Terwujudnya Pengendalian Penduduk	Rasio Akseptor KB	Persen	77,50	78,32	78,85	79,00	79,20	79,20
				Cakupan PUS yang ingin ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmetneed)	Persen	9,43	8,47	8,12	7,59	7,44	7,44
3	Meningkatkan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak	-	-	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	-	-	-	94.13	94.81	95.5
4	Mewujudkan tata kelola pemerintahan Dinas PPKB dan P3A yang Baik	-	-	Nilai kematangan organisasi Dinas PPKB dan P3A yang baik	Angka	43	43	44	45	45	46
		4.1	Meningkatnya kinerja Dinas PPKB dan P3A yang baik	Nilai SAKIP Dinas PPKB dan P3A yang baik	Angka	75,50	75,50	76,50	77,50	78,50	79,50
				Jumlah Agen Perubahan Dinas PPKB dan P3A	Angka	1	1	2	3	4	5



NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka	83	85	85	85	85	85
			Jumlah Inovasi Dinas PPKB dan P3A	Angka	0	0	1	1	1	1
			Indeks Profesionalitas ASN	Angka	65	70	75	80	80,5	85,5

2.2 Rencana Kinerja Tahunan

Rencana Kinerja Tahun 2024 Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri sebagaimana telah tertuang dalam Renstra tahun 2021 – 2026.

Adapun penetapan Rencana Kinerja Tahun 2024 Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Rencana Kinerja Tahun 2024

NO	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Target 2024
1	2	3		4	5	6
1	Mewujudkan Perlindungan Perempuan dan Anak	-	-	Rasio Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak serta Terwujudnya Kabupaten Layak Anak	Persen	100
		1.1	Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Penanganan Pengaduan	Persen	100
				Tingkat Capaian Kabupaten Layak Anak	Tingkatan	Nindya



NO	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Target 2024
1	2	3		4	5	6
2	Mewujudkan Pengendalian Penduduk	-	-	Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk	Persen	0,255
		2.1	Terwujudnya Pengendalian Penduduk	Rasio Akseptor KB	Persen	79,00
				Cakupan PUS yang ingin ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmetneed)	Persen	7,59
3	Meningkatkan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak	-	-	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	94,13
4	Mewujudkan Pemerintahan yang Baik dan Bersih	-	-	Nilai kematangan organisasi Dinas PPKB dan P3A yang baik	Angka	45
		4.1	Meningkatnya kinerja Dinas PPKB dan P3A yang baik	Nilai SAKIP Dinas PPKB dan P3A yang baik	Angka	77,50
				Jumlah Agen Perubahan Dinas PPKB dan P3A	Angka	3
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka	85
				Jumlah Inovasi Dinas PPKB dan P3A	Angka	1
				Indeks Profesionalitas ASN	Angka	80

2.3 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan



Anak Kabupaten Wonogiri Tahun 2024 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri Tahun 2021-2026, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPPA) Tahun 2024, Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dengan beberapa kali perubahan kinerja dikarenakan adanya pergantian pejabat dan perubahan anggaran. Uraian Perjanjian Kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Mewujudkan Perlindungan Perempuan dan Anak	Rasio Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak serta Terwujudnya Kabupaten Layak Anak	100 Persen
1.1	Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Penanganan Pengaduan	100 Persen
		Tingkat Capaian Kabupaten Layak Anak	Nindya Tingkatan
2	Mewujudkan Pengendalian Penduduk	Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk	0,255 Persen
2.1	Terwujudnya Pengendalian Penduduk	Rasio Akseptor KB	79,00 Persen
		Cakupan PUS yang ingin ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmetneed)	7,59 Persen



No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target
3	Meningkatkan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak	Indeks Pembangunan Gender	94,13 Indeks
4	Mewujudkan tata kelola pemerintahan Dinas PPKB dan P3A yang baik	Nilai kematangan organisasi Dinas PPKB dan P3A yang baik	45 Angka
4.1	Meningkatnya kinerja Dinas PPKB dan P3A yang baik	Nilai SAKIP Dinas PPKB dan P3A yang baik	77,50 Angka
		Jumlah Agen Perubahan Dinas PPKB dan P3A	3 Angka
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85 Angka
		Jumlah Inovasi Dinas PPKB dan P3A	1 Angka
		Indeks Profesionalitas ASN	80 Angka

No	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	75.000.000	APBD
2	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	40.000.000	APBD
3	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	76.000.000	APBD
4	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	545.600.000	APBD,APBN
5	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	7.061.178.000	APBD,APBN
6	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	5.440.200.000	APBD,APBN
7	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.129.758.898	APBD
TOTAL		17.367.736.898	



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas /pemberi amanah. Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri selaku pengembang amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran srategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2024. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.



3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

Persentase	Predikat	Kode Warna
< 100%	Tidak Tercapai	Red
= 100%	Tercapai/ Sesuai Target	Green
> 100%	Melebihi Target	Blue

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut :



No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian	Kode Warna
1	Sangat Baik	$\geq 91\%$	Green
2	Baik	76 – 90,99%	Light Green
3	Cukup	66 – 75,99%	Yellow
4	Kurang	51 – 65,99%	Yellow
5	Sangat Kurang	$\leq 50,99\%$	Red

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2021-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2024. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Tahun 2024, telah ditetapkan sebanyak 4 tujuan, 3 sasaran dan sebanyak 13 indikator kinerja (*outcomes*).

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi



pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor 57 tahun 2023.

Hasil pengukuran kinerja sasaran strategis berdasarkan perjanjian kinerja perubahan terakhir Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri tahun 2024 menunjukkan hasil sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini :

Tabel 3.1.1
Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
1	Mewujudkan Perlindungan Perempuan dan Anak	Rasio Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak serta Terwujudnya Kabupaten Layak Anak	Persen	100	100	100	Tujuan	Dinas PPKB dan P3A Kab. Wonogiri



No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
1.1	Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Penanganan Pengaduan	%	100	100	100	Sasaran	Dinas PPKB dan P3A Kab. Wonogiri
		Tingkat Capaian Kabupaten Layak Anak	Tingkatan	-	-	100	Sasaran	Dinas PPKB dan P3A Kab. Wonogiri
2	Mewujudkan Pengendalian Penduduk	Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk	%	0,255	-0,81	517,64	Tujuan	Dispendukcapil Kab. Wonogiri
2.1	Terwujudnya Pengendalian Penduduk	Rasio Akseptor KB	%	79,00	81,17	102,75	Sasaran	Dinas PPKB dan P3A Kab. Wonogiri
		Cakupan PUS yang ingin ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmetneed)	%	7,59	5,93	121,87	Sasaran	Dinas PPKB dan P3A Kab. Wonogiri
3	Meningkatkan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	94,13	92,11	97,85	Tujuan	BPS Jawa Tengah
4	Mewujudkan tata kelola pemerintahan Dinas PPKB dan P3A yang Baik	Nilai kematangan organisasi Dinas PPKB dan P3A yang baik	Angka	45	37	82,22	Tujuan	Dinas PPKB dan P3A Kab. Wonogiri
4.1	Meningkatnya kinerja Dinas PPKB dan P3A yang baik	Nilai SAKIP Dinas PPKB dan P3A yang baik	Angka	77,50	77,25	99,68	Sasaran	Hasil penilaian Sakip Inspektorat Kab. Wonogiri
		Jumlah Agen Perubahan Dinas PPKB dan P3A	Angka	3	3	100	Sasaran	Dinas PPKB dan P3A Kab. Wonogiri
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka	85	88,87	104,55	Sasaran	Dinas PPKB dan P3A Kab. Wonogiri
		Jumlah Inovasi Dinas PPKB dan P3A	Angka	1	3	300	Sasaran	Dinas PPKB dan P3A Kab. Wonogiri
		Indeks Profesionalitas ASN	Angka	80	82,44	103,05	Sasaran	Hasil penilaian SIASN dan BKPSDM Kab. Wonogiri



Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Tujuan dan Sasaran Strategis sebagai berikut :

Pada tahun 2024 ada beberapa capaian kinerja yang tidak mencapai diantaranya Indikator Nilai SAKIP Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri dengan capaian 99.68% hal ini dikarenakan komponen penilaian pengukuran kinerja yang hasilnya masih sama dengan tahun 2022, jika dibandingkan komponen lainnya perencanaan kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2022. Oleh karena itu, perlu koordinasi dengan lintas OPD guna peningkatan capaian pada tahun berikutnya. Nilai SAKIP Dinas PPKB dan P3A sebagaimana Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2023.

Tabel 3.1.1.1
Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Dinas PPKB dan P3A Tahun 2023

No	Komponen/Sub Komponen/ Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			2022	2023
1	Perencanaan Kinerja	30,00	21,00	24,60
2	Pengukuran Kinerja	30,00	21,60	21,60
3	Pelaporan Kinerja	15,00	11,25	12,30
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	17,50	18,75
	Nilai Akuntabilitas Kinerja		71,36	77,25
			BB	BB

Berdasarkan tabel hasil evaluasi, terdapat 6 rekomendasi yang harus ditindaklanjuti, sebagaimana matrik tindaklanjut evaluasi AKIP Tahun 2023 sebagai berikut :



Tabel 3.1.1.2
Matrik Tindak Lanjut Evaluasi AKIP Tahun 2023

No	Rekomendasi	Rencana Aksi	Penanggung Jawab	Status/Progres Penyelesaian
1	Mempublikasikan seluruh dokumen Perencanaan Kinerja yang telah diformalkan secara tepat waktu, yaitu maksimal 2 (dua) bulan setelah disahkan.	Telah mempublikasikan dokumen Perencanaan Kinerja pada website resmi Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.	Kepala Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri	Screenshot website Dinas PPKB dan P3A https://dinasppkbdanp3a.wonogirikab.go.id/web yang telah memuat dokumen perencanaan kinerja.
2	Berupaya secara maksimal untuk memenuhi target kinerja yang telah diperjanjikan dengan mengoptimalkan pemantauan kinerja secara berkala serta menerapkan manajemen resiko sehingga mampu memberikan rekomendasi perbaikan manajemen kinerja yang dapat dilaksanakan demi perbaikan dan peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja.	Target yang belum tercapai ialah IP ASN dan nilai SAKIP. Upaya yang telah dilakukan antara lain membuat diklat ke BKPSDM , mengimbau para ASN untuk mengikuti diklat /bintek/seminar, mengirimkan ASN tugas belajar, serta menindaklanjuti hasil evaluasi AKIP.	Kepala Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri	Surat rekomendasi tugas belajar an. Daniel Kristanto, Depi Maemona dan Mubarok. Sertifikat pelatihan an. Mubarok, Suhartono, Bina Yuliatama, Sri Ariyanti, Indah Kuswati, Rumdiyah, Supartono, Retno Ari Erlina, Emilia Susanti, Yuni Saptanti dan Depi Maemona. Sertifikat pelatihan MOOC Anti Korupsi an. Mubarok, Retno Ari Erlina, Rima Mahanani, Agus Purwanto, Suhartono, Sunarto, dan Daniel Kristanto. Rapat koordinasi monev pengukuran kinerja triwulan I tahun 2024. Rapat koordinasi monev pengukuran kinerja triwulan II tahun 2024.



No	Rekomendasi	Rencana Aksi	Penanggung Jawab	Status/Progres Penyelesaian
3	Menyelaraskan indikator kinerja individu yang tercantum dalam e-SAKIP dengan indikator yang tercantum dalam SKP.	Telah menyelaraskan IKI pada aplikasi E-Sakip dengan SKP serta menyesuaikan pada aplikasi SiTAMPPAN dengan tupoksi masing-masing pegawai.	Kepala Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri	IKI dan SKP yang telah selaras an. Depi Maemona, Yuni Saptanti dan Sunarto. Himbauan kesesuaian SKP dan aktivitas SiTAMPPAN dengan tugas dan fungsi individu. Sosialisasi penilaian kinerja triwulan II tahun 2024.
4	Menyajikan informasi mengenai kualitas atas keberhasilan/kegagalan mencapai target kinerja beserta upaya nyata dan /atau hambatannya pada dokumen laporan kinerja.	Telah melaksanakan monev IKI Triwulan I dan II tahun 2024 lengkap dengan analisis faktor pendukung, penghambat dan tindak lanjut.	Kepala Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri	Monev IKI Triwulan I dan II tahun 2024.
5	Melakukan pemantauan internal secara berkala (misal melalui rapat-rapat rutin) untuk membahas pencapaian target perjanjian kinerja disertai analisis faktor pendukung dan penghambatnya serta rekomendasi tindak lanjut yang spesifik.	Telah melaksanakan pemantauan internal secara berkala namun belum secara spesifik membahas pencapaian target Perjanjian Kinerja.	Kepala Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri	Undangan, Daftar Hadir dan Notulen rapat internal tanggal 24 April 2024, 15 Juli 2024, dan 8 Agustus 2024.



No	Rekomendasi	Rencana Aksi	Penanggung Jawab	Status/Progres Penyelesaian
6	Memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja untuk penyesuaian perencanaan kinerja berikutnya sehingga penetapan target dapat realistik, achievable dan didukung dengan sumber daya yang memadai.	Telah menyusun matrik tindak lanjut AKIP Tahun 2023 sebagai langkah perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja	Kepala Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri	Matrik Tindak Lanjut Evaluasi AKIP Tahun 2023

Untuk Indeks Pembangunan Gender tercapai sebesar 97,85%, dari target 94,13 realisasi 92,11. Angka Indeks Pembangunan Gender sebesar 92,11 masih menggunakan perhitungan data tahun 2023, sedangkan untuk perhitungan data tahun 2024 belum dirilis pada website Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah.

Tabel 3.1.1.3
Nilai Indeks Pembangunan Gender Tahun 2024

Kabupaten / Kota	[IPG] Indeks Pembangunan Gender (IPG)		
	2021	2022	2023
PROVINSI JAWA TENGAH	92,48	92,83	92,87
Kabupaten Cilacap	87	87,02	87,34
Kabupaten Banyumas	88,54	89,15	89,14
Kabupaten Purbalingga	93,08	93,21	93,51
Kabupaten Banjarnegara	95,32	95,19	95,09
Kabupaten Kebumen	93,06	93,26	93,37
Kabupaten Purworejo	95,33	95,59	95,34
Kabupaten Wonosobo	92,78	92,65	92,95
Kabupaten Magelang	91,89	92,21	92,49
Kabupaten Boyolali	94,22	94,37	94,7
Kabupaten Klaten	96	96,11	95,79
Kabupaten Sukoharjo	96,52	96,96	97,37
Kabupaten Wonogiri	91,07	91,73	92,11



Kabupaten / Kota	[IPG] Indeks Pembangunan Gender (IPG)		
	2021	2022	2023
Kabupaten Karanganyar	96,63	97,03	97,29
Kabupaten Sragen	91,68	92,24	92,49
Kabupaten Grobogan	85,89	86,18	86,23
Kabupaten Blora	84,59	84,92	85,68
Kabupaten Rembang	87,32	87,6	87,68
Kabupaten Pati	92,21	92,42	92,49
Kabupaten Kudus	92,96	93,56	93,83
Kabupaten Jepara	91,28	91,44	91,53
Kabupaten Demak	91,16	91,3	91,17
Kabupaten Semarang	96,61	96,6	96,64
Kabupaten Temanggung	95,74	95,99	96,19
Kabupaten Kendal	93,3	93,79	94,29
Kabupaten Batang	91,86	91,88	92,48
Kabupaten Pekalongan	92,56	92,72	92,83
Kabupaten Pemalang	86,49	86,72	87,14
Kabupaten Tegal	87,53	88,22	88,64
Kabupaten Brebes	86,65	87,19	87,13
Kota Magelang	95,54	95,91	96,43
Kota Surakarta	96,89	96,84	97,15
Kota Salatiga	95,37	95,44	95,45
Kota Semarang	95,67	95,93	95,96
Kota Pekalongan	95,42	95,32	95,65
Kota Tegal	93,26	93,39	93,64

Sedangkan Indikator Nilai Kematangan Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri tercapai sebesar 82,22%, dari target 45 realisasi sebesar 37, ini dikarenakan variabel untuk penilaian inovasi belum direplikasi oleh pihak lain.

Tabel 3.1.1.4
Nilai Kematangan Dinas PPKB dan P3A Tahun 2024

11 Variabel Penilaian Kematangan											Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
4	4	4	4	3	1	4	4	3	2	4	37



Indikator yang tercapai 100% yaitu Rasio Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak serta Terwujudnya Kabupaten Layak Anak dan Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Penanganan Pengaduan hal ini menunjukkan bahwa korban kasus kekerasan terhadap perempuan dan Anak di kabupaten Wonogiri sudah mendapatkan pendampingan dan penanganan. Pada tahun 2024 indikator Tingkat Capaian Kabupaten Layak Anak belum bisa menargetkan Nindya, dikarenakan penilaian Kabupaten Layak Anak pada tahun 2024 berbeda dengan tahun 2023, penilaian KLA dilakukan ditahun 2024 tetapi untuk hasil disampaikan pada tahun 2025, sehingga capaiannya tetap 100%. Sedangkan Indikator Jumlah Agen Perubahan yang direncanakan 3 dapat terealisasi 3 agen perubahan pada Dinas PPKB dan P3A sehingga capaian kinerjanya mencapai 100%. Nama-nama agen perubahan pada Dinas PPKB dan P3A adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1.1.5
Agen Perubahan Dinas PPKB dan P3A Tahun 2024

NO	NAMA	NIP	JABATAN
1.	Suhartono, SE.MM	19701022 199903 1 003	Sekretaris Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri
2.	Emilia Susanti, SE	19720405 199603 2 005	Kasubbag Keuangan Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri
3.	Yuni Saptanti, SE	19710601 200701 2 015	Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri

Capaian kinerja yang melebihi target 100% ditunjukan pada indikator Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk dengan target 0,255% realisasinya -0,81% maka capaian sebesar 517,64% rumus perhitungan capaian ($2 \times$ Rencana) - Realisasi dibagi Rencana dikalikan 100, dengan asumsi



(Semakin tinggi realisasi menunjukkan capaian yang semakin rendah, begitu juga sebaliknya) sumber data Dispendukcapil Kabupaten Wonogiri. Selanjutnya indikator Rasio Akseptor KB dengan capaian kinerja 102,75% hal ini menunjukkan bahwa di Kabupaten Wonogiri Rasio perserta KB sudah baik hal ini perlu dipertahankan dan ditingkatkan untuk lebih meningkatkan dampak program diantaranya penurunan angka stunting, penurunan angka kematian ibu dan bayi, penurunan kawin anak, hal tersebut juga didorong dengan terpenuhinya indikator Cakupan PUS yang ingin ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmetneed) dengan capaian kinerja 121,87% pada tahun 2024 dengan asumsi unmetneed (Semakin tinggi realisasi menunjukkan capaian yang semakin rendah, begitu juga sebaliknya). Untuk Indikator Profesional ASN capaian sebesar 103,05% hasil ini melebihi target yang diperjanjikan dengan langkah yang telah diambil memotivasi ASN melanjutkan pendidikan guna meningkatkan kapasitas SDM secara mandiri, ini dibuktikan dengan adanya 2 pegawai ASN Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri yang melanjutkan pendidikan secara mandiri. Sehingga nilai IP ASN lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Tabel 3.1.1.6
Nilai Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2024

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/GOL RUANG	JABATAN	NILAI IP ASN
1	KURNIA LISTIYARINI,A.P.,M.Si	19750521 199311 2 001	Pembina Utama Muda, IV/c	Kepala Dinas PPKB dan P3A	79
2	SUHARTONO, SE,MM	19701022 199903 1 003	Pembina Tk. 1 ,IV/b	Sekretaris	80
3	INDAH KUSWATI, SH, MM	19670920 199403 2 007	Pembina IV/a	Kabid Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	80
4	BINA YULIATAMA, S.E,MM	19790701 201001 2 001	Penata Tk. I III/d	Kabid Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	80
5	SRI ARIYANTI, S.STP,MM	19810401 199912 2 001	Pembina IV/a	Kabid Keluarga Sejahtera	75
6	SUPARTONO, SKM, MPH	19761021 200604 1 010	Pembina IV/a	JF Penata KKB Ahli Muda	90



**Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan
Perempuan Dan Perlindungan Anak**

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/GOL RUANG	JABATAN	NILAI IP ASN
7	RUMDIYAH, S.Sos	19700528 199303 2 006	Penata Tk I III/d	JF Penata KKB Ahli Muda	85
8	EMILIA SUSANTI, SE	19720405 199603 2 005	Penata Tk. I III/d	Kasubbag Keuangan	90
9	RETNO ARI ERLINA, SE, MM	19730301 200801 2 003	Penata Tk. I III/d	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	80
10	RETNO ASTUTI, SE	19661026 199503 2 002	Penata Tk I III/d	Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda	80
11	DANIEL KRISTANTO TEGUH DARMOJO, A.MK	19741127 200501 1 006	Penata III/c	JF Penata KKB Ahli Muda	75
12	RIMA MAHANANI,SE	19710527 200701 2 009	Penata Muda Tk. I III/b	Penyusun Laporan Keuangan	90
13	YUNI SAPTANTI,SE	19710601 200701 2 015	Penata Muda Tk. I III/b	Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	90
14	AGUS PURWANTO,SE	19760809 201001 1 003	Penata Muda III/a	Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	75
15	SUNARTO	19730813 201001 1 003	Pengatur II/d	Pengelola Sarana Dan Prasarana Kantor	80
16	DEPI MAEMONA, A.Md	19890824 202012 2 002	Pengatur II/c	Pengelola Sarana Dan Prasarana Kantor	90
JUMLAH TOTAL					1319
NILAI INDEKS PROFESIONALITAS ASN					82,44



Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) mencapai 104,55%, Nilai Indeks Kepuasan (IKM) Dinas PPKB dan P3A sebagaimana Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2024, tempat survei pada Dinas PPKB dan P3A, waktu survei pada bulan Mei 2024 dengan responden sejumlah 43 orang.

Tabel 3.1.1.7

Pengolahan Data Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2024

PENGOLAHAN DATA SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT									
PER RESPONDEN DAN PER UNSUR PELAYANAN									
UNIT PELAYANAN					: DINAS PPKB DAN P3A KABUPATEN WONOGIRI : Jl. Mayjend Sutoyo S 26 Wonogiri : (0273) 321017				
ALAMAT Tlp/Fax.									
NILAI UNSUR PELAYANAN									
NO.	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
1	3	3	3	4	3	3	3	3	4
2	3	3	3	4	3	3	3	2	3
3	4	3	3	4	3	3	3	3	4
4	4	4	3	4	4	3	4	4	4
5	4	3	3	4	3	3	3	3	4
6	3	3	3	4	3	3	3	3	4
7	4	4	3	4	3	3	3	3	4
8	4	4	3	4	3	3	3	3	4
9	4	3	3	4	3	3	3	3	4
10	4	3	3	4	3	4	4	3	4
11	3	3	3	4	3	3	3	3	4
12	3	4	3	4	4	4	3	3	4
13	4	3	3	4	4	3	4	4	4
14	3	3	3	4	3	3	3	3	4
15	3	3	3	4	3	3	3	3	4
16	3	3	3	4	3	3	3	3	4
17	3	4	3	4	3	3	4	3	4
18	3	3	3	4	3	3	3	3	4
19	4	3	3	4	4	3	4	3	4
20	3	3	3	4	2	3	3	3	4
21	3	3	3	4	3	3	3	3	4
22	4	4	4	4	4	4	4	4	4
23	4	3	3	4	4	4	3	4	4
24	4	4	4	4	4	4	4	4	4





Mutu Pelayanan :						
A (Sangat Baik)		: 81,26 - 100,00	C (Kurang Baik)	: 43,76 - 62,50		
B (Baik)		: 62,51 - 81,25	D (Tidak Baik)	: 25,00 - 43,75		

Selanjutnya Indikator Jumlah Inovasi Dinas PPKB dan P3A tercapai 300% dari jumlah inovasi yang ditargetkan 1 dapat terealisasi 3 inovasi yang dihasilkan. Inovasi Dinas PPKB dan P3A adalah :

1. RELASI (Remaja Lawan Stunting)

Stunting Campaign RELASI (Remaja Lawan Stunting) adalah sebuah inovasi yang dikembangkan dalam pelaksanaan KIE kreatif kepada remaja di Kabupaten Wonogiri berbasis digital. Karena KIE yang hanya sekedar sosialisasi satu arah kurang diminati remaja dan tak jarang tidak membawa hasil yang diharapkan. Melalui aksi kampanye remaja lawan stunting, remaja tidak hanya sekedar menerima sosialisasi, namun remaja diajak turut berperan aktif dalam menyebarkan informasi tentang pencegahan stunting. Dengan adanya RELASI terlihat jelas peran remaja dalam ikut serta lawan stunting.

2. MOP (Medis Operasi Pria)

Inovasi MOP sebuah Inovasi yang dikembangkan oleh Dinas PPKB dan P3A Kab. Wonogiri melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat yang dilakukan oleh Penyuluh KB (PKB) dan Kader KB (PPKBD dan Sub PPKBD) dalam pencapaian akseptor KB Medis Operasi Pria (MOP). Dengan adanya inovasi ini semakin tergerak Pria dalam Ber-KB.

3. WOLIPENAK (Wonogiri Peduli Perempuan dan Anak)

Wonogiri Peduli Perempuan dan Anak (WOLIPENAK) sebuah Inovasi yang dikembangkan oleh Dinas PPKB dan P3A Kab. Wonogiri melalui kegiatan WOLIPENAK diharapkan dapat meningkatkan semangat kerja Tim Perlindungan Perempuan



dan Anak Kabupaten Wonogiri serta menumbuhkan keberanian warga untuk melaporkan adanya kejadian kekerasan terhadap perempuan dan anak kepada pihak-pihak yang berwajib.

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga membandingkan kinerja dengan tahun-tahun sebelumnya. Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2024 sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan anak Kabupaten Wonogiri tahun 2021–2026 dibandingkan dengan tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :



Tabel 3.1.2
Analisis Realisasi Kinerja dan Pencapaian Kinerja

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	2022			2023			2024		
				Target	Realisasi	Capaian%	Target	Realisasi	Capaian%	Target	Realisasi	Capaian%
1	Mewujudkan Perlindungan Perempuan dan Anak	Rasio Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak serta Terwujudnya Kabupaten Layak Anak	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1.1	Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Penanganan Pengaduan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		Tingkat Capaian Kabupaten Layak Anak	Tingkatan	Madya	Madya	100	Madya	Madya	100	-	-	100
2	Mewujudkan Pengendalian Penduduk	Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk	%	0.265	0.092	165.28	0.260	0.315	78.89	0.255	-0.81	517.64



Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan
Perempuan Dan Perlindungan Anak

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	2022			2023			2024		
				Target	Realisasi	Capaian%	Target	Realisasi	Capaian%	Target	Realisasi	Capaian%
2.1	Terwujudnya Pengendalian Penduduk	Rasio Akseptor KB	%	78,32	79,16	101,07	78,85	79,40	100,70	79,00	81,17	102,75
		Cakupan PUS yang ingin ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmetneed)	%	8,47	6,82	119,48	8,12	6,72	117,24	7,59	5,93	121,87
3	Meningkatkan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	-	-	-	-	-	-	94,13	92,11	97,85
4	Mewujudkan tata kelola pemerintahan Dinas PPKB dan P3A yang baik	Nilai kematangan organisasi Dinas PPKB dan P3A yang baik	Angka	43	41	95,35	44	39	88,64	45	37	82,22
4.1	Meningkatnya kinerja Dinas PPKB dan P3A yang baik	Nilai SAKIP Dinas PPKB dan P3A yang baik	Angka	75,50	76,18	100,90	76,50	71,36	93,28	77,50	77,25	99,68
		Jumlah Agen Perubahan Dinas PPKB dan P3A	Angka	1	1	100	2	3	150	3	3	100
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka	85	86,54	101,81	85	88,80	104,47	85	88,87	104,55



Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan
Perempuan Dan Perlindungan Anak

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	2022			2023			2024		
				Target	Realisasi	Capaian%	Target	Realisasi	Capaian%	Target	Realisasi	Capaian%
	Jumlah Inovasi Dinas PPKB dan P3A	Angka	Angka	1	2	200	1	2	200	1	3	300
	Indeks Profesionalitas ASN	Angka	Angka	70	69,16	98,80	75	72,76	97,01	80	82,44	103,05



Tahun 2024 adalah tahun ketiga pelaksanaan Renstra Strategis 2021

- 2026 Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak kabupaten Wonogiri. Apabila pengukuran ini dibandingkan dengan indikator tahun sebelumnya dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tujuan Mewujudkan Perlindungan Perempuan dan Anak dengan satu indikator yang diperjanjikan yaitu Rasio Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak serta Terwujudnya Kabupaten Layak Anak apabila dibandingkan dengan tahun 2023 capaiannya sama 100% dengan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak 37 korban sudah dilakukan penanganan. Sehingga pada tahun 2023 Dinas PPKB dan P3A konsisten dalam penanganan kasus kekerasan terhadap Perempuan dan Anak.

Sasaran Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak dengan dua indikator yang diperjanjikan yaitu Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Penanganan Pengaduan apabila dibandingkan dengan tahun 2023 capaiannya sama 100% dengan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak 37 korban sudah dilakukan penanganan. Sehingga pada tahun 2023 Dinas PPKB dan P3A konsisten dalam penanganan kasus kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, indikator yang kedua adalah Tingkat Capaian Kabupaten Layak Anak pada tahun 2024 tidak bisa menargetkan dan tidak bisa memberikan realisasi, dikarenakan hasil penilaian Kabupaten Layak Anak Tahun 2024 akan diberikan pada tahun 2025, jika dibandingkan tahun 2023 sama tercapai 100%.

Tujuan Mewujudkan Pengendalian Penduduk dengan satu indikator yang diperjanjikan yaitu Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk apabila dibandingkan dengan tahun 2023 capaiannya 78,89%, lebih baik tahun 2024 dengan capaiannya 517,64%. Realisasi masih menggunakan Buku Data Kependudukan Semester I Tahun 2024 dan Buku Data Kependudukan



Semester II Tahun 2023 Dispendukcapil Kabupaten Wonogiri. Perhitungan jumlah penduduk dapat dilakukan setiap semester. Data penduduk tahun 2024 semester I tahun 2024 bersumber dari website Dispendukcapil Kabupaten Wonogiri. Dengan rumus (Jumlah penduduk saat ini dikurangi jumlah penduduk tahun sebelumnya) dibagi jumlah penduduk saat ini dikalikan 100%. $(1.063.902 - 1.072.582) : 1.063.902 \times 100\% = -0,81\%$. Hasil ini dikarenakan di kabupaten wonogiri sedang melakukan perekaman data E-KTP dan sampai semester 1 tahun 2024 belum selesai sehingga Jumlah Penduduk belum bisa terdata semuanya. Perhitungan rumus % capaian adalah $(2 \times \text{Rencana}) - \text{Realisasi} \text{ dibagi Rencana dikalikan } 100, (2 \times 0,255) - 0,81 \text{ dibagi } 0,255 \text{ dikalikan } 100 = 517,64$. Dengan asumsi (Semakin tinggi realisasi menunjukkan capaian yang semakin rendah)

Sasaran Terwujudnya Pengendalian Penduduk terdapat dua indikator yang diperjanjikan yaitu Rasio Akseptor KB pada tahun 2024 lebih tinggi capainnya dibandingkan dengan tahun 2023 dan apabila kita lihat dari realisasi tahun 2024 melebihi realisasi pada tahun 2023.

(Jumlah Peserta KB Aktif dibagi Jumlah Pasangan Usia Subur) dikali 100%
 $(118.619 \text{ dibagi } 146.130) \times 100\% = 81,17\%$.

Dengan rumus perhitungan capaian (Realisasi dibagi Rencana dikalikan 100%)
 $81,17 \text{ dibagi } 79,00 \times 100\% = 102,75\%$

Indikator yang kedua adalah Cakupan PUS yang ingin ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmetneed) tahun 2024 121,87%, capaian ini apabila dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2023 sebesar 117,24% tahun 2024 lebih tinggi dan jika dilihat dari realisasi tahun 2024 masih lebih baik dibanding tahun 2023.

Rumus cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmetneed)



(Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) Ingin Anak Tunda (IAT) ditambah Tidak Ingin Anak Lagi (TIAL) dibagi Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) dikalikan 100%

$$((8.670) : 146.130) \times 100\% = 5,93\%$$

Rumus capaian :

2 x rencana - realisasi dibagi rencana x 100% dengan asumsi (Semakin rendah realisasi semakin tinggi capaianya)

$$(2 \times 7,59) - 5,93 \text{ dibagi } 7,59 \times 100\% = 121,87\%$$

Tujuan Meningkatkan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak dengan satu indikator diperjanjikan yang baru masuk di cascading Renstra Dinas PPKB dan P3A tahun 2024 yaitu Indeks Pembangunan Gender. Jadi indikator ini tidak bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Tetapi melihat hasil realisasi Indeks Pembangunan Gender masih menggunakan data tahun 2023 dari BPS Jawa Tengah, karena tahun 2024 belum dirilis.

Tujuan Mewujudkan tata kelola pemerintahan Dinas PPKB dan P3A yang baik dengan satu indikator diperjanjikan Nilai kematangan organisasi Dinas PPKB dan P3A yang baik apabila dibandingkan dengan tahun 2023 capaianya 88,64% dan ditahun 2024 capaianya 82,22% lebih rendah, hal ini dikarenakan, variabel untuk penilaian inovasi tahun 2024 belum direplikasi oleh pihak lain, sehingga mempengaruhi hasil realisasi nilai kematangan organisasi Dinas PPKB dan P3A tahun 2024.

Pada sasaran Meningkatnya kinerja Dinas PPKB dan P3A yang baik ada 5 indikator dalam pengukurannya yaitu Nilai SAKIP Dinas PPKB dan P3A yang baik pada tahun 2024 tercapai 99,68% lebih tinggi apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2023 sebesar 93,28%, hal ini bisa dilihat pada 3 komponen penilaian evaluasi SAKIP yang meningkat meliputi Perencanaan Kinerja 24,60, Pelaporan Kinerja 12,30, Evaluasi Akuntabilitas



Kinerja Internal 18,75 dibandingkan dengan tahun 2023, sedangkan komponen Pengukuran Kinerja 21,60 masih sama dibandingkan dengan tahun 2023.

Indikator jumlah agen perubahan pada tahun 2024 tercapai 100%, ini lebih rendah dibandingkan tahun 2023 tercapai 150%, hal ini dikarenakan pada Dinas PPKB dan P3A tahun 2023 terdapat 3 agen perubahan sebagai Roll model sehingga melebihi dari target yang ditetapkan 2 agen perubahan. Indikator yang ke tiga adalah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tercapai 104,55% pada tahun 2024 capaian indikator ini lebih baik apabila dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 104,47%. Diharapkan kedepan semakin baik dan memuaskan tingkat pelayanan Dinas PPKB dan P3A kepada masyarakat. Indikator jumlah inovasi Dinas PPKB dan P3A pada tahun 2024 apabila dibandingkan dengan tahun 2023 lebih tinggi, karena adanya tambahan inovasi wolipenak. Indeks profesionalitas ASN pada tahun 2024 tercapai 103,05% lebih tinggi dibandingkan capaian tahun 2023 tercapai 97,01%, dengan langkah yang telah diambil memotivasi ASN melanjutkan pendidikan guna meningkatkan kapasitas SDM secara mandiri.

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Tabel 3.1.3
Analisis Pencapaian Kinerja dengan Target Akhir RPJMD

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2024	Target Akhir 2026	% Capaian	Tingkat Kemajuan
1	Mewujudkan Perlindungan Perempuan dan Anak	Rasio Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak serta Terwujudnya Kabupaten Layak Anak	Persen	100	100	100	Sangat Baik



No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2024	Target Akhir 2026	% Capaian	Tingkat Kemajuan
1.1	Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Penanganan Pengaduan	%	100	100	100	Sangat Baik
		Tingkat Capaian Kabupaten Layak Anak	Tingkatan	-	Utama	n/a	Akan tercapai
2	Mewujudkan Pengendalian Penduduk	Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk	%	-0,81	0,245	509,80	Sudah melebihi target RPJMD
2.1	Terwujudnya Pengendalian Penduduk	Rasio Akseptor KB	%	81,17	79,20	102,48	Sudah melebihi target RPJMD
		Cakupan PUS yang ingin ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmetneed)	%	5,93	7,44	120,29	Sudah Melebihi target RPJMD
3	Meningkatkan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	92,11	95,5	96,45	Akan tercapai
4	Mewujudkan tata kelola pemerintahan Dinas PPKB dan P3A yang baik	Nilai kematangan organisasi Dinas PPKB dan P3A yang baik	Angka	37	46	80,43	Akan tercapai
4.1	Meningkatnya kinerja Dinas PPKB dan P3A yang baik	Nilai SAKIP Dinas PPKB dan P3A yang baik	Angka	77,25	79,50	97,16	Akan tercapai
		Jumlah Agen Perubahan Dinas PPKB dan P3A	Angka	3	5	60,00	Akan tercapai
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka	88,87	85	104,55	Sudah Melebihi target RPJMD
		Jumlah Inovasi Dinas PPKB dan P3A	Angka	3	1	300,00	Sudah Melebihi target RPJMD
		Indeks Profesionalitas ASN	Angka	82,44	85,5	96,42	Akan tercapai

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar Nasional/ Provinsi



Tabel 3.1.4

Analisis Pencapaian Kinerja dengan Target Standar Nasional/Provinsi

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2024	Standar Nasional	% Capaian
1	Mewujudkan Perlindungan Perempuan dan Anak	Rasio Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak serta Terwujudnya Kabupaten Layak Anak	Persen	100	100	100
1.1	Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Penanganan Pengaduan	%	100	100	100
		Tingkat Capaian Kabupaten Layak Anak	Tingkatan	-	KLA	n/a
2	Mewujudkan Pengendalian Penduduk	Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk	%	-0,81	0,99	281,82
2.1	Terwujudnya Pengendalian Penduduk	Rasio Akseptor KB	%	81,17	65,24	124,41
		Cakupan PUS yang ingin ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmetneed)	%	5,93	8,1	126,79
3	Meningkatkan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	92,11	n/a	n/a
4	Mewujudkan tata kelola pemerintahan Dinas PPKB dan P3A yang baik	Nilai kematangan organisasi Dinas PPKB dan P3A yang baik	Angka	37	39,62	93,38
4.1	Meningkatnya kinerja Dinas PPKB dan P3A yang baik	Nilai SAKIP Dinas PPKB dan P3A yang baik	Angka	77,25	77,69	99,43
		Jumlah Agen Perubahan Dinas PPKB dan P3A	Angka	3	n/a	n/a
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka	88,87	87,14	101,98
		Jumlah Inovasi Dinas PPKB dan P3A	Angka	3	n/a	n/a
		Indeks Profesionalitas ASN	Angka	82,44	79,83	103,26



Apabila dibandingkan dengan target Standar Nasional, ada 5 indikator yang sudah sangat baik, sehingga ini perlu dipertahankan untuk pencapaian tahun berikutnya. 5 indikator yang sudah melampaui target standar Nasional tetapi tidak serta merta hal ini menyurutkan semangat kinerja untuk capaian kinerja yang lebih baik, karena standar RPJMD kita lebih tinggi dari standar nasional, sehingga perlu terus meningkatkan capaian kinerja tahun berikutnya. Ada 3 indikator yang tidak dapat dibandingkan dengan target nasional, karena tidak ada target dari indikator nasional dan ada 2 indikator yang dibandingkan dengan nilai standar nasional masih belum tercapai.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan :

Tabel 3.1.5
Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	Mewujudkan Perlindungan Perempuan dan Anak	Rasio Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak serta Terwujudnya Kabupaten Layak Anak	Persen	100	100	100	- Sudah adanya SATGAS PPA, Sudah tersedianya Nomor layanan pengadaan P2TP2A, Sudah adanya lembaga layanan pemberdayaan perempuan dan anak dan Adanya koordinasi antar lembaga layanan	- Penindakan tegas terhadap perlakuan KDRT sehingga memberikan efek jera dan Memberikan inisiasi terkait pencegahan terhadap Perempuan dan Anak di 25 Kecamatan
1.1	Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Penanganan Pengaduan	%	100	100	100	- Sudah adanya SATGAS PPA, Sudah tersedianya Nomor layanan pengadaan P2TP2A, Sudah adanya lembaga layanan pemberdayaan perempuan dan anak dan Adanya koordinasi antar lembaga layanan	- Penindakan tegas terhadap perlakuan KDRT sehingga memberikan efek jera dan Memberikan inisiasi terkait pencegahan terhadap Perempuan dan Anak di 25 Kecamatan



No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
		Tingkat Capaian Kabupaten Layak Anak	Tingkatan	-	-	100	- Adanya lembaga forum anak, Pengembangan sekolah ramah anak, puskesmas ramah anak, desa/kelurahan layak anak, kesehatan ramah anak dan Peningkatan pemenuhan hak anak khususnya di perlindungan anak	- Sosialisasi tentang pengembangan Kabupaten Layak anak, Pembentukan kelembagaan Forum Anak sampai ditingkat terbawah, Advokasi pengembangan SRA , Yankes Layak Anak dan Kecamatan, Desa/Kel Layak Anak, Advokasi pengembangan SRA , Yankes Layak Anak dan Kecamatan, Desa/Kel Layak Anak
2	Mewujudkan Pengendalian Penduduk	Percentase Laju Pertumbuhan Penduduk	%	0,255	-0,81	517,64	1. Program keluarga berencana yang semakin di mengerti oleh setiap Penduduk 2. Pembatasan usia minimal untuk melakukan pernikahan 3. Pembatasan tunjangan anak bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS)	1.Meningkatkan pemahaman tentang keluarga berencana, keluarga kecil berkualitas melalui Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE). 2. Melakukan pelayanan KB baik secara rutin maupun dalam momen-momen tertentu dengan tetap menerapkan protokol kesehatan di 25 kecamatan
2.1	Terwujudnya Pengendalian Penduduk	Rasio Akseptor KB	%	79,00	81,17	102,75	-Sosialisasi yang terus menerus baik dari tingkat Pusat sampai dengan tingkat Daerah. -Pelayanan KB baik secara rutin maupun dalam momen-momen tertentu	Meningkatkan pemahaman masyarakat dalam pemakaian alat kontrasepsi dan menyadarkan minimnya efek samping dalam pemakaian alat kontrasepsi dengan pertemuan dan pembinaan oleh kader IMP



**Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan
Perempuan Dan Perlindungan Anak**

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
		Cakupan PUS yang ingin ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmetneed)	%	7,59	5,93	121,87	- Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) yang selalu digerakkan untuk pencapaian target kinerja. -Selalu mengadakan Penyuluhan sampai lini lapangan	Meningkatkan pemahaman masyarakat dalam pemakaian alat kontrasepsi dan menyadarkan minimnya efek samping dalam pemakaian alat kontrasepsi dengan pertemuan dan pembinaan oleh kader IMP
3	Meningkatkan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	94,13	92,11	97,85	Merupakan hasil realisasi Indeks Pembangunan Gender (IPG) pada tahun 2023, formulasi perhitungan realisasi dilakukan oleh BPS Jawa Tengah	Menggunakan hasil realisasi perhitungan tahun 2024
4	Mewujudkan tata kelola pemerintahan Dinas PPKB dan P3A yang Baik	Nilai kematangan organisasi Dinas PPKB dan P3A yang baik	Angka	45	37	82,22	Dari 11 Variabel penilaian nilai kematangan tahun 2024 ada beberapa variabel yang membuat realisasi rendah yaitu inovasi, inovasi belum bisa direplikasi oleh pihak lain	Meningkatkan kembali beberapa capaian variabel yang belum memenuhi target yang ditetapkan
4.1	Meningkatnya kinerja Dinas PPKB dan P3A yang baik	Nilai SAKIP Dinas PPKB dan P3A yang baik	Angka	77,50	77,25	99,68	Komitmen bersama dalam pencapaian SAKIP lebih baik dan Ketepatan dalam membuat laporan tetapi pada tahun 2024 ada indikator penilaian yang berbeda dibandingkan tahun 2022 sehingga nilai SAKIP belum dapat tercapai.	Meningkatkan pencapaian kinerja.
		Jumlah Agen Perubahan Dinas PPKB dan P3A	Angka	3	3	100	Mendorong pegawai untuk mempunyai peran sebagai agen perubahan	pemilihan agen perubahan
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka	85	88,87	104,55	Meningkatkan pelayanan Dinas PPKB dan P3A	Forum Konsultasi Publik dalam pelayanan publik
		Jumlah Inovasi Dinas PPKB dan P3A	Angka	1	3	300	Menciptakan Inovasi pada beberapa kegiatan	Semakin meningkatkan Inovasi Dinas PPKB dan P3A
		Indeks Profesionalitas ASN	Angka	80	82,44	103,05	- Tidak adanya diklat aparatur, - Masih kurangnya pengembangan Inovasi	Usulan diklat aparatur ke BKD dan menciptakan Inovasi di OPD



Apabila dilihat dari tabel Analisis Keberhasilan/ Kegagalan Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, sudah memetakan langkah – langkah solusi yang perlu dilakukan. Solusi tersebut diatas merupakan strategi peningkatan pelayanan Perlindungan Anak serta peningkatan pelayanan Program Bangga Kencana juga peningkatan pelayanan aparatur pemerintahan.

Sehingga arah kebijakan yang perlu di ambil adalah memperkuat koordinasi dan meningkatkan kwalitas lembaga layanan perlindungan perempuan dan anak, memperkuat koordinasi dan komitmen dengan mitra kerja, serta meningkatkan kwalitas sumber daya manusia sampai pada tingkat lini lapangan, termasuk PPKBD dan Sub PPKBD.

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tingkat efisiensi dan efektifitas dihitung pada tiap-tiap sasaran. Tingkat efisiensi diukur dari selisih antara persentase rata-rata capaian per sasaran dengan persentase rata-rata penyerapan anggaran. Sedangkan tingkat efektifitas diukur dari hasil pembagian rata-rata persentase capaian per sasaran dengan rata-rata persentase penyerapan per sasaran dikalikan 100 (seratus). Secara lengkap tingkat efisiensi dan efektifitas kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (Dinas PPKB dan P3A) Kabupaten Wonogiri Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini :



Gambar 3.1

Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Kinerja Tahun 2024

No	Satuan	Indikator	Sasas	Kinerja			Kinerja					
				Target	Realisasi	(%)	Program	Prog	Realisasi	(%)		
1	Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak	1.1 Cukupan Pangan dan Anak Kurban Kekurangan yang mendapat Pengawas Pengadaan	%	100	100	100	100,00	1	PROGRAM PENGEMBANGAN KUALITAS KELUARGA	75.000.000	75.314.300	99,35
				Target	-	-	100,00	2	PROGRAM PENGELOLAHAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	40.000.000	39.313.900	98,28
		1.2 Tingkat Capaian Kehalaman Layak Anak		-	-	-	100,00	3	PROGRAM PENINGKATAN HAK ANAK (PNA)	76.000.000	74.350.900	98,02
		RATA-RATA CAPAIAN DARI 2 INDIKATOR		-	-	-	100,00	TOTAL PER SASARAN		191.000.000	185.774.900	97,27
		TINGKAT EFISIENSI 2,53 %		TINGKAT EFektifitas 102,88 %								
2	Terwujudnya Pengembangan Penduduk	2.1 Rasio Akseptor KB	%	75%	79%	81,17	102,58	4	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	542.000.000	527.712.594	96,73
				-	-	-	102,58	5	PROGRAM PEMERINTAHAN KELUARGA BERENCANA (KKB)	7.063.379.000	6.860.017.820	97,49
		2.2 Cukupan PUS yang login beri KB Tidak Terpenuhi (Kurangmaksud)		-	-	-	102,58	6	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN KELUARGA SEJAHTERA (KKS)	5.410.296.000	5.170.946.170	96,73
		RATA-RATA CAPAIAN DARI 2 INDIKATOR		-	-	-	102,58	TOTAL PER SASARAN		13.846.976.000	12.781.385.774	97,97
		TINGKAT EFISIENSI 34,34 %		TINGKAT EFektifitas 104,85 %								
3	Meningkatnya kinerja Dinas PPKB dan PJA yang baik	3.1 Nilai SAKIP Dinas PPKB dan PJA yang baik 3.2 Jumlah Agen Penyalur Dinas PPKB dan PJA 3.3 Jumlah Incentif Dinas PPKB dan PJA 3.4 Indeks Profesionalisme ASN Dinas PPKB dan PJA 3.5 Indeks Kepuasan Masyarakat (SKM) Dinas PPKB dan PJA	Angka	17,50	17,25	98,48	100,00	7	PROGRAM PENUNJANG LURAH PEMERINTAHAN DAERAH KARUPUTNOKTA	4.128.759.000	3.955.723.422	95,62
				-	-	100,00	100,00	TOTAL PER SASARAN		4.128.759.000	3.955.723.422	95,62
				-	-	100,00	100,00	TOTAL KESELURUHAN		17.367.734.898	16.391.286.098	95,00
				-	-	100,00	100,00	TOTAL KESELURUHAN		17.367.734.898	16.391.286.098	95,00
				-	-	100,00	100,00	TOTAL KESELURUHAN		17.367.734.898	16.391.286.098	95,00
		RATA-RATA CAPAIAN DARI 5 INDIKATOR		-	-	100,00	100,00	TOTAL KESELURUHAN		17.367.734.898	16.391.286.098	95,00
		TINGKAT EFISIENSI 55,84 %		TINGKAT EFektifitas 105,12 %								



Pada sasaran meningkatnya perlindungan perempuan dan anak, tingkat efisiensi 2,73% dan tingkat efektifitas 102,81%, hal ini menunjukkan bahwa penyerapan anggaran berdampak pada efektifitas capaian sasaran. Adapun efisiensi yang dilakukan merupakan bagian dari penekanan penggunaan anggaran yang kurang mendukung capaian sasaran. Pada sasaran terwujudnya pengendalian penduduk tingkat efisiensi 14,34% tingkat efektifitas 114,63%, penyerapan anggaran berpengaruh sangat besar pada capaian sasaran. Sehingga capaian sasaran melebihi dari target yang ditetapkan, efisiensi anggaran pada sasaran ini pada program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) dikarenakan adanya sub kegiatan yang digunakan untuk pendampingan keluarga belum bisa dilakukan secara maksimal. Pada sasaran meningkatnya kinerja Dinas PPKB dan P3A yang baik, tingkat efisiensi 55,84% dan tingkat efektifitas 165,22%, tingkat efisiensi ini dikarenakan belanja gaji tidak dapat terserap secara maksimal dikarenakan adanya pegawai yang pensiun dan mutasi. Sehingga terlihat efektifitas sangat tinggi.

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Beberapa program/kegiatan yang mendorong pencapaian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri dapat dilihat pada analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja Dinas sebagai berikut



Tabel 3.1.6

Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/Tidak menunjang
1	Mewujudkan Perlindungan Perempuan dan Anak	Rasio Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak serta Terwujudnya Kabupaten Layak Anak	Persen	100	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Rasio KDRT	187,93	Menunjang
					Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang Berperan aktif	100,00	Menunjang
					Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam daerah kabupaten/Kota	Penerima Informasi dan Edukasi KG dan PA bagi Keluarga	100,00	Menunjang
1.1	Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Penanganan Pengaduan	%	100	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Percentase Pemenuhan Hak Anak	100,00	Menunjang
					Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Percentase lembaga pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha dalam PHA	100,00	Menunjang



Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan
Perempuan Dan Perlindungan Anak

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/Tidak menunjang
		Tingkat Capaian Kabupaten Layak Anak	Tingkatan	100	Program Pengelolaan Sistem data Gender dan Anak	Persentase Ketersediaan data Gender dan Anak	100,00	Menunjang
					Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	OPD yang Mempunyai Data Gender dan Anak	100,00	Menunjang
2	Mewujudkan Pengendalian Penduduk	Percentase Laju Pertumbuhan Penduduk	%	517,64	Program Pengendalian Penduduk	Total Fertility rate (TFR)	109,59	Menunjang
					Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah Penerima Implementasi Pendidikan Kependudukan	100,00	Menunjang
					Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	100,00	Menunjang
2.1	Terwujudnya Pengendalian Penduduk	Rasio Akseptor KB	%	102,75	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Percentase peningkatan peserta KB aktif	102,75	Menunjang
					Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)	Jumlah Promosi dan KIE serta sosialisasi Program KKBPK	100,00	Menunjang
					Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/ PLKB)	Jumlah PPKBD dan Sub PPKBD	100,00	Menunjang



Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan
Perempuan Dan Perlindungan Anak

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/Tidak menunjang
					Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Percentase Pelayanan KB di Daerah	100,00	Menunjang
					Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Bangga Kencana	100,00	Menunjang
		Cakupan PUS yang ingin ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmetneed)	%	121,87	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Percentase peserta KB aktif bagi anggota kelompok BKB BKR BKL dan UPPKA	100,00	Menunjang
					Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan	Jumlah Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	100,00	Menunjang
3	Meningkatkan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	97,85	Program Pengelolaan Sistem data Gender dan Anak	Percentase Ketersediaan data Gender dan Anak	100,00	Menunjang
					Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	OPD yang Mempunyai Data Gender dan Anak	100,00	Menunjang



No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/Tidak menunjang
4	Mewujudkan tata kelola pemerintahan Dinas PPKB dan P3A yang Baik	Nilai kematangan organisasi Dinas PPKB dan P3A yang baik	Angka	82,22	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Tertib Pelaporan Kinerja Administrasi Pemerintahan Daerah	100,00	Menunjang
4.1	Meningkatnya kinerja Dinas PPKB dan P3A yang baik	Nilai SAKIP Dinas PPKB dan P3A yang baik	Angka	99,68	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Administrasi Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah disusun	100,00	Menunjang
	Jumlah Agen Perubahan Dinas PPKB dan P3A	Angka	100	Administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase administrasi keuangan daerah yang di susun	100,00	Menunjang	
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka	104,55	Administrasi Umum perangkat daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Umum perangkat daerah	100,00	Menunjang	
	Jumlah Inovasi Dinas PPKB dan P3A	Angka	300	Penyediaan Jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100,00	Menunjang	
	Indeks Profesionalitas ASN	Angka	103,05	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	100,00	Menunjang	

Pada tujuan Mewujudkan Perlindungan Perempuan dan Anak ada 1 (satu) program yang menunjang keberhasilan capaian kinerja. Sasaran Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak ada 2 (dua) program yang menunjang keberhasilan capaian kinerja. Program yang menunjang kinerja ini rata-rata 100%. Tujuan Mewujudkan Pengendalian



Penduduk ada 1 (satu) program yang menunjang keberhasilan capaian kinerja dengan capaian diatas 100%. Sasaran Terwujudnya pengendalian penduduk terdapat 2 (dua) program yang menunjang keberhasilan capaian kinerja, 1 (satu) Program capaiannya diatas 100% dan 1 (satu) program capaiannya 100%. Tujuan Meningkatkan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak dengan 1 (satu) program yang menunjang keberhasilan capaian kinerja. Tujuan Mewujudkan tata kelola pemerintahan Dinas PPKB dan P3A yang Baik dan Sasaran Meningkatnya kinerja Dinas PPKB dan P3A yang baik terdapat 1 (satu) program yang menunjang pencapaian kinerja. Rata-rata capaian program penunjang kinerja adalah 100%. Tetapi masih diharapkan untuk dapat meningkatkan capaian guna keberhasilan yang lebih baik.

3.2 REALISASI ANGGARAN

Pada Sub Bab ini dibahas mengenai Realisasi Anggaran, khususnya pada perhitungan antara pagu anggaran yang telah direncanakan sesuai Perjanjian Kinerja dan ditetapkan pada APBD dan APBDP Kabupaten Wonogiri. Penggunaan anggaran pada Tahun Anggaran 2024 berdasar Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut ini :



Tabel 3.2.1
Capaian Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	75.000.000	71.514.700	95,35
	Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	70.000.000	66.514.700	95,02
	Sub Kegiatan Pelaksanaan komunikasi informasi dan edukasi KG dan perlindungan anak bagi keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	70.000.000	66.514.700	95,02
	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	5.000.000	5.000.000	100
	Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	5.000.000	5.000.000	100
2	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	40.000.000	39.313.900	98,28
	Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	40.000.000	39.313.900	98,28
	Sub Kegiatan Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	40.000.000	39.313.900	98,28
3	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	76.000.000	74.950.900	98,62
	Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	76.000.000	74.950.900	98,62
	Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendamping Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah Non Pemerintah Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten /Kota	76.000.000	74.950.900	98,62
4	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	4.033.574.448	3.535.723.422	87,66
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22.000.000	21.521.000	97,82
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20.000.000	19.522.000	97,61
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.000.000	1.999.000	99,95
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.974.764.898	2.635.190.708	88,58
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.973.764.898	2.634.190.708	88,58
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1.000.000	1.000.000	100



No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	128.113.500	125.463.498	97,93
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	49.093.500	46.487.900	94,69
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	17.020.000	17.020.000	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12.000.000	11.964.350	99,7
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50.000.000	49.991.248	99,98
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	813.974.000	563.312.355	69,21
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000	1.000.000	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	86.850.400	73.078.575	84,14
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	726.123.600	489.233.780	67,38
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	190.906.500	190.235.861	99,65
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	85.906.500	85.855.661	99,94
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	102.500.000	101.888.500	99,4
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.500.000	2.491.700	99,67
5	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	545.600.000	527.772.594	96,73
	Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	20.000.000	19.685.400.	98,43
	Sub Kegiatan Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Non Formal	20.000.000	19.685.400.	98,43
	Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	525.600.000	508.087.194	96,67
	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	60.000.000	58.158.000	96,93
	Sub Kegiatan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	231.600.000	231.600.000	100
	Sub Kegiatan Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	234.000.000	218.329.194	93,3
6	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	7.061.178.000	6.884.017.030	97,49
	Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	2.151.750.000	2.110.709.200	98,09
	Sub Kegiatan Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	237.000.000	226.373.000	95,52
	Sub Kegiatan Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik	202.000.000	188.431.400	93,28



No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcams), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	381.250.000	381.250.000	100
	Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	1.245.000.000	1.231.542.400	98,92
	Sub Kegiatan Pengendalian Program KKBPK	86.500.000	83.112.400	96,08
	Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluhan KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	882.000.000	882.000.000	100
	Sub Kegiatan Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	882.000.000	882.000.000	100
	Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	2.910.678.000	2.774.557.830	95,32
	Sub Kegiatan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	41.400.000	41.400.000	100
	Sub Kegiatan Peningkatan Kesetaraan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	2.175.302.000	2.097.610.000	96,43
	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	602.433.000	549.854.830	91,27
	Sub Kegiatan Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	45.543.000	42.292.500	92,86
	Sub Kegiatan Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	6.000.000	3.826.000	63,77
	Sub Kegiatan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	10.000.000	9.680.500	96,81
	Sub Kegiatan Peningkatan Kesetaraan KB Pria	30.000.000	29.894.000	99,65
	Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	1.116.750.000	1.116.750.000	100
	Sub Kegiatan Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	5.190.000	5.190.000	100
	Sub Kegiatan Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	1.111.560.000	1.111.560.000	100
7	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	5.440.200.000	5.370.596.150	98,72
	Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	375.000.000	305.396.150	81,44



No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	300.000.000	232.750.000	77,58
	Sub Kegiatan Orientasi/ Pelatihan Teknis Pelaksana/ Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	10.000.000	9.424.350	94,24
	Sub Kegiatan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	65.000.000	63.221.800	97,26
	Kegiatan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	5.065.200.000	5.065.200.000	100
	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	2.412.000.000	2.412.000.000	100
	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	2.653.200.000	2.653.200.000	100
	JUMLAH	17.367.736.898	16.503.888.696	95,03

Realisasi anggaran pada Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri pada tahun 2024 capaiannya sebesar 95,03%. Secara keseluruhan realisasi Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri dikatakan lebih dari 90% hal ini dikarenakan adanya upaya pemanfaatan anggaran guna tercapainya program kegiatan. Ada beberapa Sub Kegiatan yang kurang maksimal dalam penyerapan anggaran yaitu Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) capaiannya 77,58% dikarenakan



menunggu E-Katalog sektoral pengadaan BKKBN sehingga mempengaruhi nilai kontrak pengadaan dibandingkan dengan pagu anggaran, tetapi secara fisik sudah tercapai 100%. Sub Kegiatan Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi capaiannya 63,77% dikarenakan penyesuaian biaya Jasa Pelayanan MOW Laparoscopy mengalami kenaikan sehingga tidak bisa mencukupi target 2 akseptor mow. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor capaiannya 67,38% tidak bisa maksimal dikarenakan belum melakukan penyesuaian jumlah belanja tenaga non ASN sehingga berdampak pada rekening belanja iuran jaminan kesehatan bagi non ASN.



BAB IV PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri Tahun 2024 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri Tahun 2024. Pembuatan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKjIP Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri Tahun 2024 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Dalam tahun 2024 Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri menetapkan sebanyak 4 (empat) tujuan, 3 (tiga) sasaran dengan 13 (tigabelas) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang ingin dicapai. Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 4 tujuan dan 3 sasaran tersebut, secara umum mencapai target yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Hanya ada 3 Indikator kinerja yang belum dapat tercapai dari 13 indikator



kinerja yang diperjanjikan, sehingga capaian kinerja sasaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri tahun 2024 rata-rata 118,07%.

Dalam Tahun Anggaran 2024 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 17.367.736.898 (tujuh belas milyar tiga ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah) sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 16.503.888.696 (enam belas milyar lima ratus tiga juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah), sehingga pada tahun 2024 Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri terdapat Sisa Anggaran Rp. 863.848.202 (Delapan ratus enam puluh tiga juta delapan ratus empat puluh delapan ribu dua ratus dua rupiah) sehingga capaian Realisasi penyerapan anggaran pada Dinas Pengendalian Penduduk Dan keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan anak 95,03%.



4.2 REKOMENDASI

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri kepada pihak-pihak terkait baik sebagai *stakeholders* ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Wonogiri. Guna perbaikan kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri perlu meningkatkan kinerja dengan mengoptimalkan penyerapan anggaran guna pencapaian indikator kinerja dengan selaku melakukan koordinasi lintas sektor.

Lampiran :

Perjanjian Kinerja

RKT / Lain2 yang dianggap perlu



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : KURNIA LISTIYARINI, A.P.,M.Si
Jabatan : Kepala Dinas PPKB dan P3A

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama : JOKO SUTOPO
Jabatan : Bupati Wonogiri

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wonogiri, 15 Agustus 2024

Pihak Kedua,
JOKO SUTOPO

Pihak Pertama,
KURNIA LISTIYARINI, A.P.,M.Si

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

SKPD

: DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

TAHUN ANGGARAN

: 2024

No	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Mewujudkan Perlindungan Perempuan dan Anak	1. Rasio Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak serta Terwujudnya Kabupaten Layak Anak	100 %
2	Mewujudkan Pengendalian Penduduk	2. Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk	0.255 %
3	Meningkatkan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak	3. Indeks Pembangunan Gender	94.13 Indeks
4	Mewujudkan tata kelola pemerintahan Dinas PPKB dan P3A yang baik	4. Nilai kematangan organisasi Dinas PPKB dan P3A yang baik	45 Angka
5	Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak	5. Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Penanganan Pengaduan	100 %
		6. Tingkat Capaian Kabupaten Layak Anak	Nindya Tingkalan
6	Terwujudnya Pengendalian Penduduk	7. Rasio Akseptor KB	79.00 %
		8. Cakupan PUS yang ingin ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmetneed)	7.59 %
7	Meningkatnya kinerja Dinas PPKB dan P3A yang baik	9. Nilai SAKIP Dinas PPKB dan P3A yang baik	77.50 Angka
		10. Jumlah Agen Perubahan Dinas PPKB dan P3A	3 Angka
		11. Jumlah Inovasi Dinas PPKB dan P3A	1 Angka
		12. Indeks Profesionalitas ASN Dinas PPKB dan P3A	80 Angka
		13. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas PPKB dan P3A	85 Angka

No	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	75.000.000	APBD
2	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	40.000.000	APBD
3	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	76.000.000	APBD
4	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	545.600.000	APBD,APBN
5	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	7.061.178.000	APBD,APBN
6	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	5.440.200.000	APBD,APBN
7	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.129.758.898	APBD
TOTAL		17.367.736.898	



Bupati Wonogiri

JOKO SUTOPO



Wonogiri, 15 Agustus 2024

Kepala Dinas PPKB dan P3A

KURNIA LISTIYARINI, A.P.,M.Si

Rencana Kinerja Tahunan (Tahun 2024) DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Raihan	Target 2024
1	Mewujudkan Perlindungan Perempuan dan Anak	1. Rasio Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak serta Terwujudnya Kabupaten Layak Anak	%	100
2	Mewujudkan Pengendalian Penduduk	2. Persentase laju Pertumbuhan Penduduk	%	0.255
3	Meningkatkan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak	3. Indeks Pemhanginan Gender	Indeks	94,13
4	Mewujudkan tata kelola pemerintahan Dinas PPKB dan PSA yang baik	4. Nilai kredibilitas organisasi Dinas PPKB dan PSA yang baik	Angka	45
5	Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak	5. Capaian Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Pergantian Pengaduan	%	100
6	Terwujudnya Pengendalian Penduduk	6. Tingkat Capaian Kabupaten Layak Anak	Tingkatan	Minima
7	Meningkatnya kinerja Dinas PPKB dan PSA yang baik	7. Rasio Akseptor KB	%	79,00
		8. Capaian PLB yang ingin ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmetneed)	%	7,59
		9. Nilai SAKIP Dinas PPKB dan PSA yang baik	Angka	77,50
		10. Jumlah Agen Perluhan Dinas PPKB dan PSA	Angka	3
		11. Jumlah Inovasi Dinas PPKB dan PSA	Angka	1
		12. Indeks Profesionalitas ASN Dinas PPKB dan PSA	Angka	80
		13. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas PPKB dan PSA	Angka	85

